



# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

## **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **TAHUN 2025-2029**

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, mewajibkan Perangkat Daerah dalam hal ini DPMPTSP untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

Dokumen perencanaan strategis ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Pemalang, 4 November 2025

**KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN PEMALANG**



**KHAERON, SH., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680323 199003 1 012

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 4
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 8
1.3.1. Maksud	I – 8
1.3.2. Tujuan	I – 8
1.4. Sistematika Penulisan	I – 9
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	<b>II – 1</b>
2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP	II – 1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II – 1
2.1.1.1. Tugas dan Fungsi	II – 1
2.1.1.2. Struktur Organisasi	II – 8
2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II – 9
2.1.2.1. Sumberdaya Manusia	II – 9
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana	II – 9
2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP	II – 11
2.1.3.1. Pelayanan Perizinan	II – 11
2.1.3.2. Pelayanan Sistem Informasi DPMPTSP	II – 21
2.1.3.3. Mal Pelayanan Publik	II – 23
2.1.3.4. Pelayanan Penanaman Modal	II – 25

2.1.3.5. Pelayanan Pelaporan Penanaman Modal	II – 26
2.1.3.6. Pelayanan Pengaduan	II – 27
2.1.3.7. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan	II – 27
2.1.3.8. Kinerja Keuangan	II – 31
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan	II – 35
2.1.4. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	II – 35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	II – 36
2.2.1. Permasalahan	II – 36
2.2.2. Isu Strategis	II – 37
<b>BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>III – 1</b>
3.1. Tujuan	III – 1
3.2. Sasaran	III – 2
3.3. Strategi	III – 4
3.4. Arah Kebijakan	III – 7
<b>BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>IV – 1</b>
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV – 1
4.2. Uraian Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 28
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV – 29
4.4. Indikator Kinerja Daerah	IV – 39
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>V – 1</b>
5.1. Kesimpulan Penting Substansial	V – 1
5.2. Kaidah pelaksanaan	V – 2
5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi	V – 2
5.3. Tahun Transisi	V – 2

## DAFTAR TABEL

2.1. Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan	II – 9
2.2. Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan	II – 9
2.3. Daftar Barang Inventaris	II – 10
2.4. Pelayanan Perizinan	II – 13
2.5. Jenis Layanan dalam Mal Pelayanan Publik	II – 24
2.6. Realisasi Penanaman Modal	II – 26
2.7. Perkembangan LKPM	II – 27
2.8. Jumlah Pengaduan Yang Telah Dilayani	II – 27
2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan	II – 29
2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II – 32
2.11. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	II – 37
2.12. Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang	II – 39
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III – 3
3.2. Analisis SWOT	III – 5
3.3. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III – 6
3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III – 8
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP	IV – 4
4.2. Rencana Program, Kegiatan Subkegiatan dan Pendanaan DPMPTSP	IV – 11
4.3. Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 28
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	IV – 30
4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) DPMPTSP	IV – 32

## DAFTAR GAMBAR

1.1.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I – 2
1.2.	Penetapan Penyusunan Renstra	I – 3
2.1.	Struktur Organisasi	II – 8
2.2.	Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu	II – 21
2.3.	Gerai Investasi Kabupaten Pemalang	II – 22
2.4.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	II - 23

# BAB 1 PENDAHULUAN

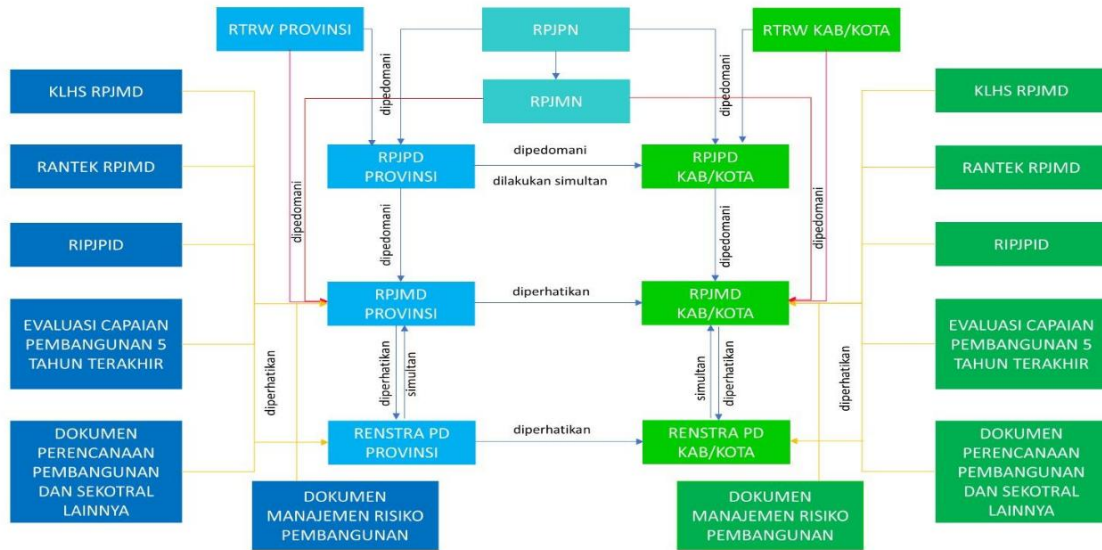
## 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

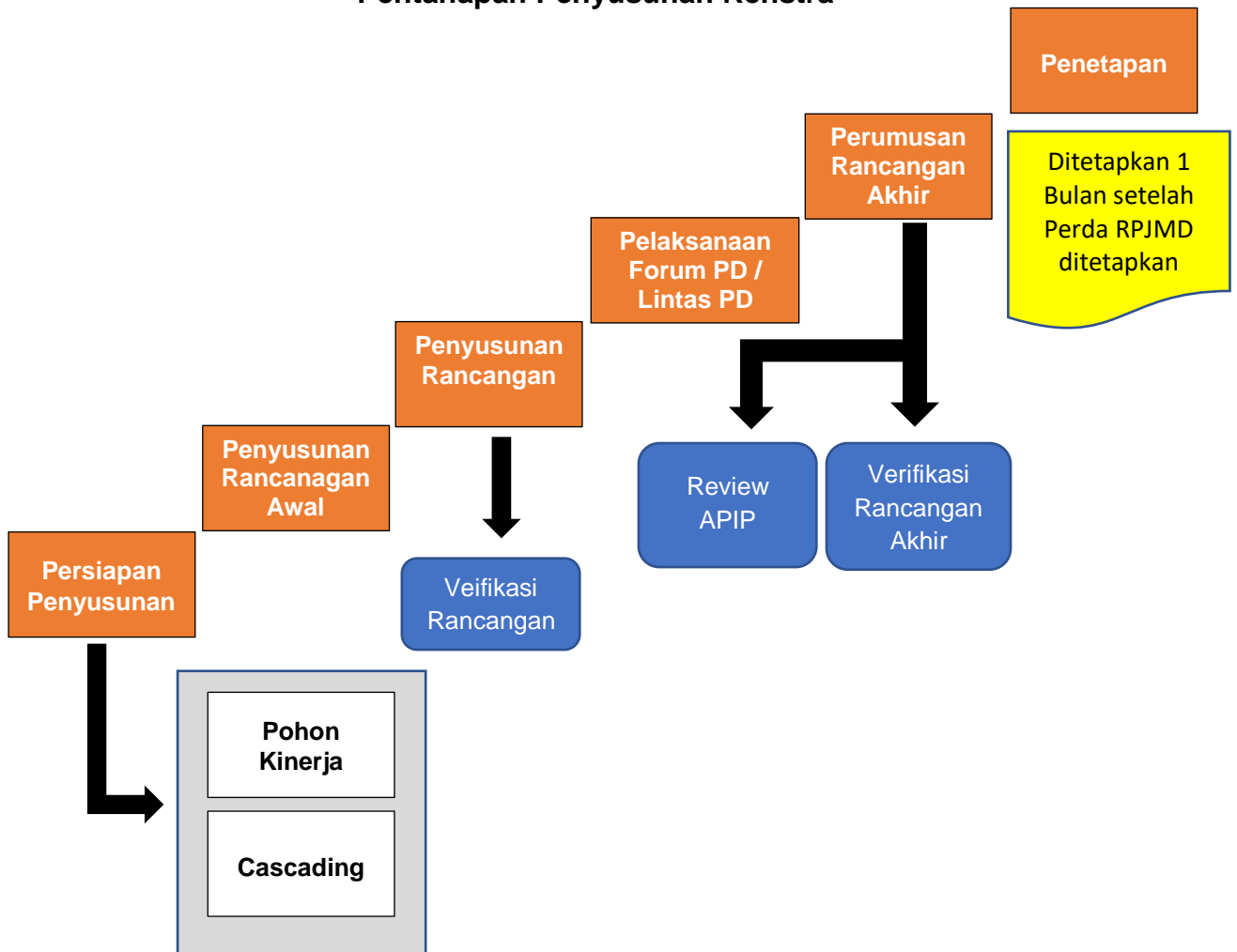
Gambar 1.1.

**Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya**



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

**Gambar 1.2.**  
**Pentahapan Penyusunan Renstra**



Seiring dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025-2029, maka pemerintah menyusun RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut terdapat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA"** dengan misinya **"RHAPSODI"** yaitu Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas. Dengan demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini berfungsi untuk menjabarkan secara eksplisit Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  23. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standat Pelayanan Minimal;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161)
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
36. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9)
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
  43. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 nomor 27);
  44. Peraturan Bupati Pemalang nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 Nomor 23)
  45. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  46. Peraturan Bupati Pemalang nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2034 (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
4. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **1.1. Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

##### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur DPMPTSP Kabupaten Pemalang

#### **2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah**

Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana.

#### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Pemalang

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Mengidentifikasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan didalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.

### **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

#### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang

#### 2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi DPMPTSP Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

#### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

#### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

#### 3.3. Strategi Perangkat Daerah

Menentukan strategi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang

#### 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang

### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

#### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu

#### 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

#### 4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang

## **BAB V. PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

##### **2.1.1.1. Tugas Dan Fungsi**

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat.

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- c. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah, serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha Daerah.
- e. Mengarahkan penyelenggaraan program promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan strategi promosi penanaman modal, dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah
- f. Mengarahkan penyelenggaraan program pelayanan penanaman modal yang meliputi penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif Daerah
- g. Mengarahkan penyelenggaraan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Mengarahkan penyelenggaraan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- i. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- j. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur spip.
- k. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan terpadu satu pintu.
- m. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- n. Merumuskan laporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan DPMPTSP
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DPMPTSP
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan DPMPTSP
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.

- b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa.
- e. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- f. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- g. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur SPIP.
- h. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
- i. Mengoordinasikan konsep inovasi daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
- k. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### **3. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- b. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
- d. mengelola data urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- e. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.

- f. menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
- g. menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.
- h. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan
- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur SPIP.
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan.
- k. menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
- c. mengelola administrasi umum, meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
- d. mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
- e. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.

- f. mengelola administrasi kepegawaian.
- g. mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
- h. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- i. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan rancangan strategis pengembangan iklim penanaman modal
- b. menyusun bahan rancangan penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
- c. menyusun data dan informasi peta potensi investasi
- d. menyusun rencana target investasi penanaman modal daerah
- e. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- f. melaksanakan kegiatan sosialisasi tata cara dan prosedur pelayanan penanaman modal
- g. memfasilitasi kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional maupun pemangku kepentingan lainnya terkait pengembangan penanaman modal
- h. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang ketentuan pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal
- i. melaksanakan kegiatan inventarisasi hambatan dan solusi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- j. memfasilitasi penanganan pengaduan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- k. menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan onsetif yang diberikan serta melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- l. melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal

- m. mengelola system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) terkait dengan Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait daerah.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu memiliki uraian tugas sebagai berikut:

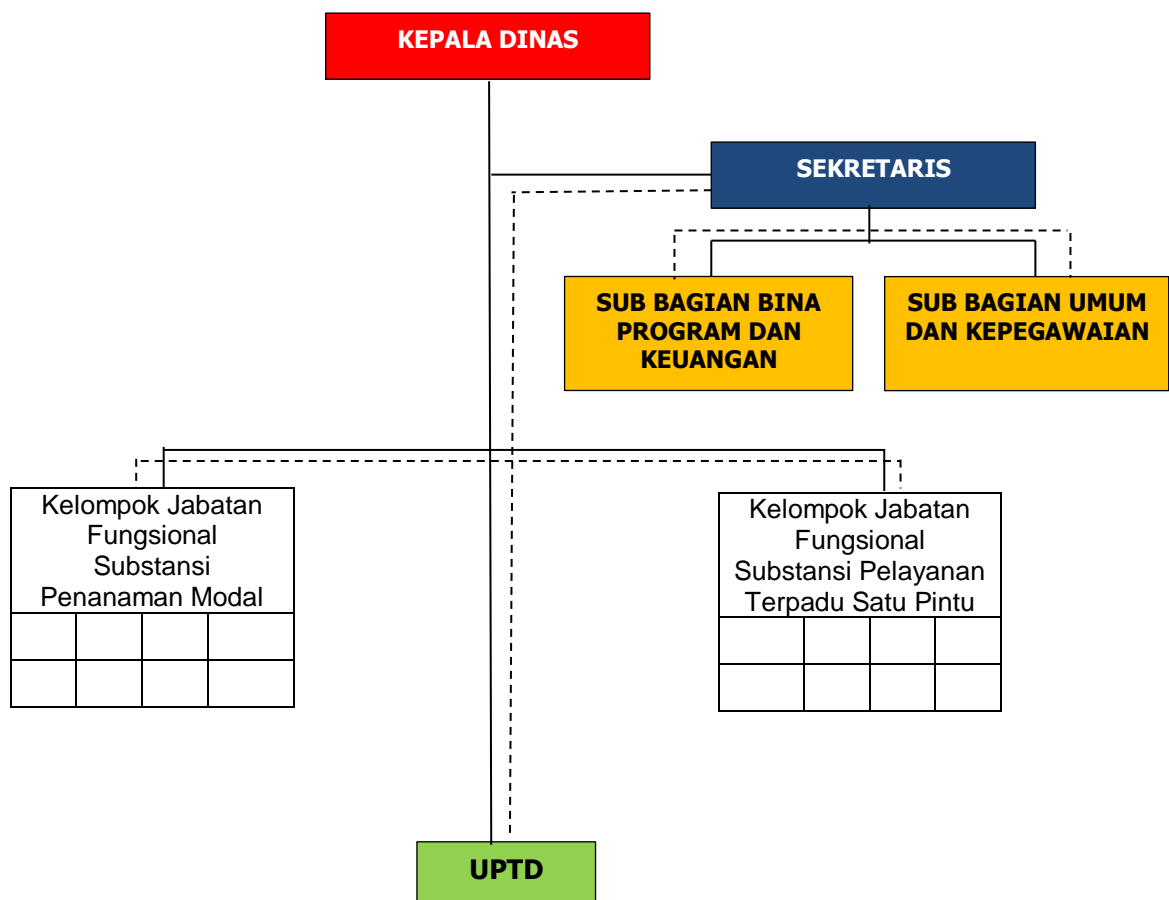
- a. merumuskan konsep strategi pengembangan pelayanan dan perizinan tidak terstruktur.
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak terstruktur secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- d. melaksanakan kegiatan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan.
- e. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga intemasional maupun pemangku kepentingan lainnya.
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan tidak terstruktur yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
- g. melaksanakan kegiatan pendaftaran perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- h. merumuskan konsep strategi pengelolaan perizinan terstruktur.
- i. melaksanakan kegiatan pelayanan penzman dan nonpenzman terseruktur secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- j. melaksanakan sosialisasi tata cara dan prosedur perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- k. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap masa berlaku izin dan peruntukan izin usaha bersama dengan OPD terkait.
- l. melaksanakan kegiatan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan terstruktur yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
- n. melakukan proses perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

### 2.1.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. UPTD
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi**



## 2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 2.1.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah sebanyak 64 orang yang terdiri dari 32 orang berstatus ASN dan 32 orang berstatus Non ASN.

**Tabel 2.1.**  
**Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	3	11	4	22
3	D3	3	-	-	-	3
4	S1	8	11	10	6	35
5	S2	3	-	1	-	4
6	S3	-	-	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang

**Tabel 2.2.**  
**Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang**  
**Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	5	3	8
3	Golongan III	10	11	21
4	Golongan IV	2	1	3

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang

### 2.1.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

**Tabel 2.3.**  
**Daftar Barang Inventaris**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Station Wagon	Unit	5	0	5
2	Sepeda Motor	Unit	11	0	11
3	Meja Komputer	Set	1	0	1
4	PC Unit	Unit	41	0	41
5	Printer	Unit	37	0	37
6	Lemari Kayu	Buah	6	0	6
7	Rak Kayu	Buah	17	0	17
8	White Board	Buah	2	0	2
9	Jam Mekanis	Buah	2	0	2
10	Kursi Besi	Buah	2	0	2
11	Exhause Fan	Unit	1	0	1
12	Televisi	Unit	2	0	2
13	Alat Rumah Tangga	Buah	5	0	5
14	Laptop	Unit	24	0	24
15	Peralatan Personal Kantor	Buah	3	0	3
16	Hub	Buah	1	0	1
17	Portable Generating Set	Set	1	0	1
18	Mesin fotocopy folio	Unit	1	0	1
19	Rak Besi	Buah	12	0	12
20	Papan Visual	Buah	1	0	1
21	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	0	1
22	Papan Nama Instansi	Buah	1	0	1
23	Meja Rapat	Buah	20	0	20
24	Meja Resepsionis	Buah	12	0	12
25	Kursi Rapat	Buah	89	0	89
26	Bangku Tunggu	Set	10	0	10
27	Sofa	Set	2	0	2
28	AC Window	Unit	6	0	6
29	AC Split	Unit	20	0	20
30	Microphone Table Stand	Set	10	0	10
31	Camera Video	Unit	1	0	1
32	Tiang Bendera	Buah	1	0	1
33	Tangga Alumunium	Buah	1	0	1
34	Dispenser	Unit	5	0	5
35	Alat Pemadam Portable	Buah	4	0	4
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III dan IV	Buah	14	0	14
37	Scanner	Unit	4	0	4
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	62	0	62
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan IV	Buah	14	0	14
40	Mesin Antrian	Unit	2	0	2
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	52	0	52
42	Audio Visual	Set	2	0	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
43	Wireless Mic	Set	1	0	1
44	Professional Sound System	Set	7	0	7
45	Peralatan Studio Audio	Set	2	0	2
46	Camera Elektronik	Unit	1	0	1
47	Telephone (PABX)	Unit	1	0	1
48	Monitor	Unit	3	0	3
49	Peralatan Jaringan Lainnya	Set	1	0	1
50	Peralatan Personal Komputer	Set	3	0	3
51	Alat Kantor Lainnya	Set	10	0	10
52	Telephone Mobile	Unit	8	0	8
53	Server	Set	2	0	2
54	Sepeda	Unit	1	0	1
55	Mesin Penghisap Debu	Unit	1	0	1
56	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	0	1
57	Mesin Absensi	Unit	3	0	3
58	Kursi Rapat	Buah	19	0	19
59	Amplifier	Set	1	0	1
60	Loudspeaker	Set	10	0	10
61	Filing Cabinet Kayu	Buah	8	0	8
62	Lemari Kaca	Buah	1	0	1
63	Modem	Buah	1	0	1
64	CCTV	Set	1	0	1
65	Digital LED Running Text	Unit	1	0	1
66	Slide Projector	Set	1	0	1
67	Layar Film	Set	1	0	1

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat. Adapun pelayanan yang telah dilaksanakan adalah :

#### 2.1.3.1. Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang saat ini melayani 44 jenis perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang..

Pada tahun 2024, jumlah permohonan perizinan yang masuk tercatat sebanyak 14.537 permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.489 permohonan telah disetujui dan diterbitkan. Tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa jenis perizinan terbanyak yang diterbitkan adalah Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yaitu sebesar 12.973 izin.

**Tabel 2.4.**  
**Pelayanan Perizinan**

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	2	2	0	5	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	1	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	6	6	0	5	4	0	4	5	0	6	4	0	25	21	0
6	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	0	0	0	0	0	0	2	2	0	13	9	0	12	9	0
7	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	2	0	5	4	0
8	Izin Reklame															
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	313	308	0	320	320	0	326	326	0	471	471	0	471	471	0
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	16	6	1	12	8	1	10	9	0	14	11	0	13	9	0

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
9	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Surat Ijin Operasional Panti	2	2	0	5	5	0	3	2	-	10	4	0	4	5	0
12	Izin Pemakaman	30	30	0	35	35	0	20	20	-	25	24	0	17	17	0
13	Izin Pengabuan Mayat	12	12	0	18	18	0	18	18	-	20	19	0	12	12	0
14	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
15	Izin Pendidikan Dasar	5	5	0	11	11	0	5	1	-	4	4	-	3	3	0
	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal	2	0	0	7	3	0	30	29	-	6	4	0	6	4	0
16	Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal															
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	4	4	0	-	-	-	3	3	-	1	0	0	3	2	0
	- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
17	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	24	22	0	119	117	0	79	80	0	51	51	0	30	25	0
22	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
23	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
26	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
32	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
35	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
36	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
37	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	3924	3924	0	5249	5249	0	11296	11297	0	13365	13365	0	12972	12973	0

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
 Tahun 2025-2029

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
43	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>																

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Pemalang, 2025

### 2.1.3.2. Pelayanan Sistem Informasi DPMPTSP

Untuk memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus perizinan maupun untuk mencari informasi peluang investasi, DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga telah mengembangkan berbagai aplikasi digital sebagai berikut :

#### a. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu

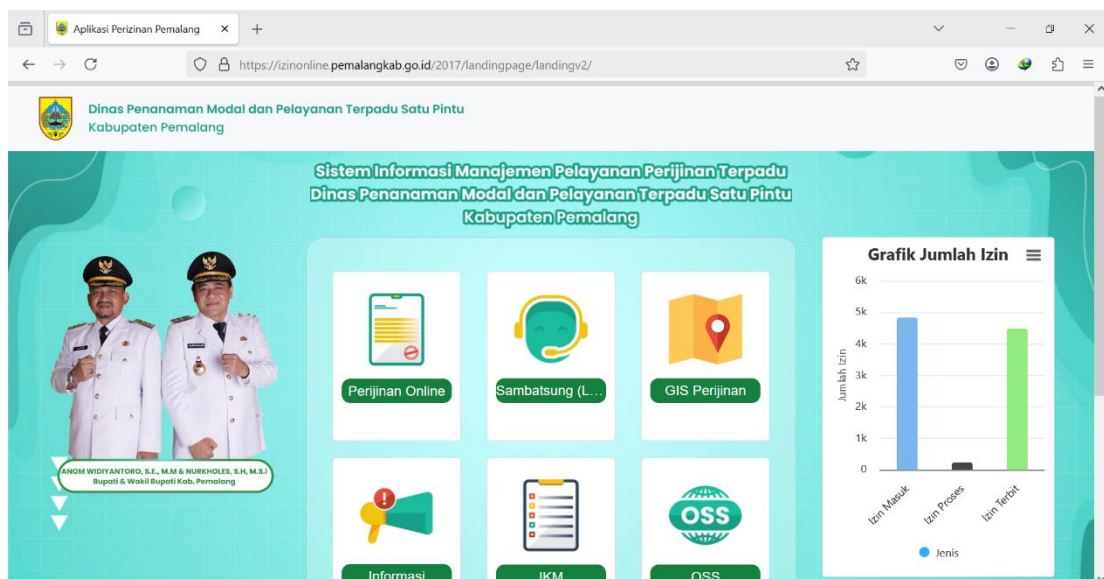
Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu merupakan program Komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan yang merupakan alat bantu dalam pemrosesan perizinan yang meliputi proses pendaftaran, pendataan, entri data, verifikasi, penetapan, dan cetak secara terintegrasi.

Program ini memudahkan masyarakat dengan cukup membuat akun, mengirimkan persyaratan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan dan memantau status permohonannya. Ketika status proses permohonan cek lokasi, maka pemohon cukup datang untuk menyerahkan dokumen asli yang dipersyaratkan.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu dapat diakses melalui <http://izinonline.pemalangkab.go.id>.

**Gambar 2.2.**

### Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu



b. Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang

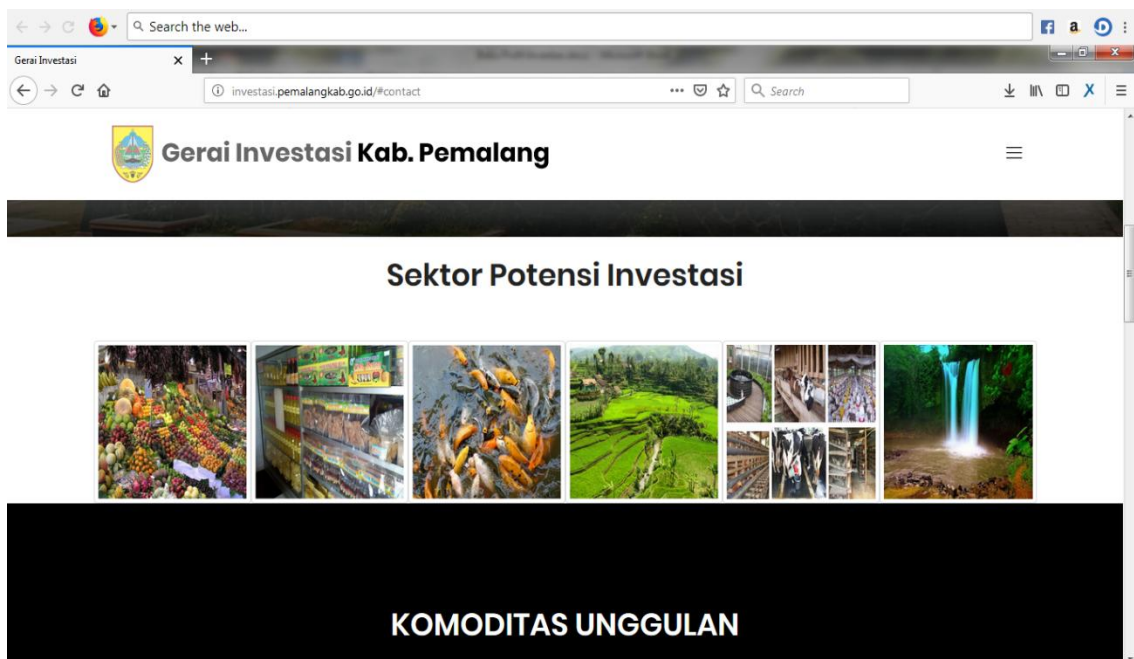
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang juga telah mengembangkan Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang.

Terobosan ini diperuntukkan guna meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas pelayanan di bidang investasi. Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini, dimaksudkan agar para investor mendapatkan layanan konsultasi penanaman modal dan informasi yang cukup sebelum berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini memanfaatkan dukungan teknologi informasi berupa media web yang dapat diakses melalui website [dpmptsp.pemalangkab.go.id](http://dpmptsp.pemalangkab.go.id) yang sangat berguna bagi investor untuk bisa melihat peluang investasi sektor hortikultura, industri, perikanan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Dalam media ini, investor juga dapat melihat informasi tata ruang dan lahan dari wilayah yang diinginkan.

**Gambar 2.3.**

**Gerai Investasi Kabupaten Pemalang**



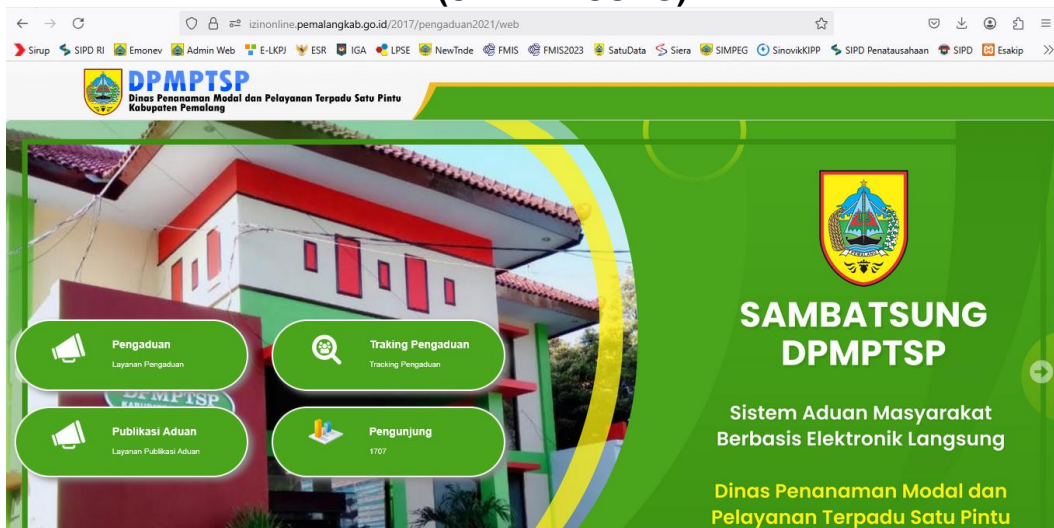
c. Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung (SAMBATSUNG)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang melakukan terobosan untuk mewujudkan sistem pengaduan yang cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi elektronik. SAMBATSUNG yang merupakan singkatan dari Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Langsung ini dibuat bersama dengan pihak ke Tiga dan Tim Inovasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

SAMBATSUNG selain memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pengaduan baik bagi penyelenggara, pemohon maupun masyarakat umum, aplikasi ini juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi diantaranya jumlah pengakses portal pengaduan, grafik pengaduan, serta proses pengaduan. Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung dapat diakses melalui laman [izinonline.pemalangkab.go.id/2017/pengaduan2021/web](http://izinonline.pemalangkab.go.id/2017/pengaduan2021/web).

**Gambar 2.4.**

**Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung  
(SAMBATSUNG)**



### 2.1.3.3. Mal Pelayanan Publik

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Pemalang saat ini juga telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik yang terletak di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPSTSP). Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada, ke dalam satu tempat dan tersistem. Hal ini merupakan wujud transformasi birokrasi pelayanan publik, dari berbelit-belit dan lambat, menjadi birokrasi modern, humanis, dan cepat. Saat ini terdapat 17 instansi pemerintah baik vertikal maupun horisontal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam MPP Kabupaten Pemalang.

**Tabel 2.5.**

**Jenis Layanan dalam Mal Pelayanan Publik**

No	Instansi	Jenis Perizinan
1	Badan Pertanahan Nasional	1. Informasi Pertanahan 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan
2	BPJS Ketenagakerjaan	1. Informasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Informasi Program Jaminan Kematian 3. Informasi Program Jaminan Hari Tua 4. Informasi Program Jaminan Pensiun 5. Informasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 6. Pendaftaran Perusahaan 7. Pendaftaran Penerima Upah 8. Pendaftaran Bukan Penerima Upah 9. Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia 10. Pendaftaran Sektor Jasa Konstruksi
3	BPJS Kesehatan	1. Pemberian Informasi 2. Pendaftaran Baru PBPJ Mandiri 3. Perubahan Data
4	Bank Jateng	1. Pembayaran Pajak, Pendidikan dan Jasa Lainnya
5	PDAM	1. Pemasangan Sambungan Baru 2. Pembayaran Rekening 3. Pengaduan Pelanggan
6	Disdukcapil	1. Kartu Keluarga 2. KTP 3. Pindah Datang Penduduk 4. Akta Kelahiran 5. Akta Kematian 6. Akta Perkawinan 7. Akta Perceraian
7	Dinas Kesehatan	1. Perizinan Baru/Perpanjangan/Perubahan 1) SUHS 2) DAM 2. Perizinan Baru/Perpanjangan/Perubahan 1) Apotik 2) Toko Obat 3) Rumah Sakit 4) Puskesmas

No	Instansi	Jenis Perizinan
		5) Klinik 6) UTD PMI
8	Bakesbangpol	1. Rekomendasi Kegiatan Penelitian
9	DLH	1. Persetujuan Lingkungan
10	DPUTR	1. Informasi Tata Ruang 2. PBG/SLF
11	Bapenda	1. Pendaftaran Wajib Pajak 2. Pembayaran Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet, Minerba, Reklame, Air Tanah)
12	Diskoperindag	1. Perizinan Usaha Sektor Perindustrian (IUI, IPUI) 2. Pendaftaran Merek 3. Pendaftaran Listrik Subsidin
13	Dishub	1. Perizinan Angkutan Orang
14	Disnaker	1. Kartu AK.1 / Kartu Kuning
15	DPMPTSP	1. Perizinan OSS 2. Perizinan Non OSS 3. Layanan Pengaduan 4. Layanan Informasi Investasi
16	Dindikbud	1. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP 2. Surat Rekomendasi Penelitian Bidang Pendidikan
17	Pengadilan Negeri Pemalang	1. Pengajuan Surat Keterangan Tidak Perperkara Secara Elektronik (ERATERANG) 2. Pengajuan ijin besuk dan ijin pinjam pakai barang bukti secara online (E-BERPADU) 3. E- filling, E-Payment, E-summons, E-Litigation dan Monitoring Perkara (E-COURT)

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

#### 2.1.3.4. Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi penanaman modal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan targetnya yaitu mencapai 107,37%. Sementara jumlah akumulasi penanaman modal dari tahun 2010 sampai tahun 2024 mencapai Rp. 3,5 triliun.

**Tabel 2.6.**  
**Realisasi Penanaman Modal**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2010		67.552.188.806	
2011		244.282.432.755	
2012		6.326.701.500	
2013		7.925.910.000	
2014		39.267.752.915	
2015		89.860.864.270	
2016	724.604.687.677	255.359.969.835	0,00
2017	729.604.687.677	28.890.500.000	0,00
2018	734.604.687.677	93.634.691.900	0,00
2019	739.604.687.677	1.753.353.206.637	0,00
2020	744.604.687.677	166.492.408.001	0,00
2021	168.157.332.081	171.698.900.267	102,11
2022	175.132.878.272	179.666.691.621	102,59
2023	185.056.692.369	197.152.213.713	106,54
2024	205.038.302.261	220.159.341.867	107,37
<b>Jumlah Akumulasi</b>		<b>3.521.623.774.087</b>	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

#### 2.1.3.5. Pelayanan Pelaporan Penanaman Modal

Pelaporan penanaman modal, atau yang dikenal dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), adalah laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh setiap penanam modal mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM mencakup realisasi investasi, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi (termasuk nilai ekspor), serta kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan investasi.

Jumlah perusahaan yang telah melaporkan kegiatan penanaman modalnya menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat yaitu dari 171 perusahaan di tahun 2020 menjadi 1.298 perusahaan di tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.7.**  
**Perkembangan LKPM**

Tahun	Status Laporan			Total
	Draft	Perlu Perbaikan	Disetujui	
2020	18	35	118	<b>171</b>
2021	30	68	300	<b>398</b>
2022	21	97	312	<b>430</b>
2023	4	209	667	<b>880</b>
2024	4	127	1.167	<b>1.298</b>

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

#### 2.1.3.6. Pelayanan Pengaduan

Jumlah pengaduan terkait perizinan yang masuk di DPMPTSP Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir jumlahnya berfluktuasi dengan rata-rata 6 sampai 7 pengaduan per tahun. Dari pengaduan yang masuk ini, kesemuanya dapat diselesaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

**Tabel 2.8.**

#### Jumlah Pengaduan Yang Telah Dilayani

No	Tahun	Jumlah Aduan	Hasil
1	2020	7	Selesai
2	2021	6	Selesai
3	2022	10	Selesai
4	2023	1	Selesai
5	2024	8	Selesai

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

#### 2.1.3.7. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan Indikator program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah melaksanakan kinerja pelayanan sebagai berikut :

- a. Peningkatan jumlah investor  
Realisasi peningkatan PMA dan PMDN menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan targetnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan rasio capaian sebesar 2.539% dan 177,38%. Pada tahun 2024 jumlah investor yang masuk sebanyak 29 Investor, jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 39 investor. Namun demikian hal ini tidak berdampak pada realisasi investasinya yang mengalami kenaikan sebesar 11,67% dari tahun 2023.
- b. Terselenggaranya promosi penanaman modal  
Realisasi terlaksananya promosi penanaman modal menunjukkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini berdampak pada peningkatan realisasi investasi yang meningkat dari tahun ke tahun.
- c. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal  
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir realisasi terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal telah melebihi dari target yang direncanakan, dimana pada tahun 2024 rasio capaiannya mencapai 104,17%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan DPMPTSP semakin baik.
- d. Pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu  
Pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu dalam program pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjukkan realisasi capaian yang lebih tinggi dibandingkan targetnya dimana pada tahun 2024 ditarget hanya 46% namun realisasinya mencapai 100% atau rasio pencapaiannya sebesar 217,39%. Peningkatan ini menunjukkan pelaku usaha semakin patuh memberikan LKPM. Namun demikian perhitungan ini perlu dievaluasi kembali apakah sudah mencakup seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pemalang.
- e. Realisasi Perizinan  
Realisasi perizinan juga menunjukkan realisasi yang melebihi targetnya, kecuali pada tahun 2024 dimana realisasi hanya sebesar 89,77% dibawah target 100% yang ditetapkan. Perhitungan ini juga perlu dievaluasi kembali mengingat rasio capaian maksimal seharusnya 100%.

**Tabel 2.9.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>				-	2,95%	3,00%	3,05%	3,10%	-	-40%	76,19 %	5,41%	- 25,64 %	-	- 13,56 %	2539 %	177,38 %	- 827,1 %
	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas /insentif di bidang penanaman modal				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi investasi				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	<b>Persentase terlaksananya promosi penanaman modal</b>				-	100%	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	100%
	Jumlah nilai investasi				-	168.157.332.081	171.520.479.000	176.666.093.000	183.732.737.000	-	171.698.900.267	179.666.691.621	197.152.213.713	220.159.341.867	-	102,11 %	104,75 %	111,60 %	119,83 %
	<b>Persentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>				-	95%	95%	96%	96%	-	98,71 %	98,58 %	99,89 %	100%	-	103,91 %	103,77 %	104,05 %	104,17 %
	Persentase perizinan yang disetujui				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu</b>				-	40%	42%	44%	46%	-	85,71 %	100%	100%	100%	-	214,28 %	238,10 %	227,27 %	217,39 %
	Persentase terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	<b>Persentase realisasi perizinan</b>				-	100%	100%	100%	100%	-	160,28 %	190,01 %	156,92 %	89,77 %	-	160,28 %	190,01 %	156,92 %	89,77 %
	Persentase tersusunnya data/ informasi pelayanan perizinan				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

#### **2.1.3.8. Kinerja Keuangan**

Rasio penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mencapai 99,86% pada tahun 2024. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasinya, tertinggi terdapat pada Program Promosi Penanaman Modal yang mencapai 3.855% untuk anggaran dan 3.852% untuk realisasinya. Kenaikan anggaran program ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam upaya meningkatkan investasi melalui promosi penanaman modal.

**Tabel 2.10.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	5.468.289	5.918.214	5.440.866	5.185.966	0	5.160.223,7	5.700.443	5.293.816	4.831.187	0	94,37	96,32	97,30	93,16	-5%	-6%
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	0	28.461,4	64.575	1.110	9.970	0	26.116,8	60.606,2	1.110	9.306	0	91,76	93,85	100	93,34	-65%	-64%
Program Promosi penanaman Modal	0	7.079,7	254.319,5	270.220	280.030	0	7.070,1	250.405,1	269.143,3	279.408	0	99,86	98,46	99,60	99,78	3855%	3852%
Program pelayanan Penanaman Modal	0	363.391	158.759,2	225.000	109.072	0	360.622,9	157.745,2	222.245	106.588,2	0	99,24	99,36	98,78	97,72	-70%	-70%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	429.367,5	376.321,5	342.570	790.092	0	262.196,7	370.244,9	342.414	788.960,2	0	61,07	98,39	99,95	99,86	84%	201%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman	0	12.324,5	30.370,7	40.000	31.000	0	12.266,3	30.292,3	39.993,8	30.924	0	99,53	99,74	99,98	99,75	152%	152%

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Modal																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	862.630	0	0	0	0	858.002	0	0	0	0	99,46	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	376.934	0	0	0	0	374.831	0	0	0	0	99,44	0	0	0	0	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.100	0	0	0	0	26.100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	192.137	0	0	0	0	189.893	0	0	0	0	98,83	0	0	0	0	-	-
Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.856	0	0	0	0	4.856	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	37.383	0	0	0	0	35.568	0	0	0	0	95,14	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	440.185	0	0	0	0	422.163	0	0	0	0	95,91	0	0	0	0	-	-

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025-2029

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	560.263	0	0	0	0	554.426	0	0	0	0	98,96	0	0	0	0	-	-
Program penanganan pengaduan dibidang investasi dan perijinan	19.985	0	0	0	0	15.789	0	0	0	0	79	0	0	0	0	-	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan DPMPTSP baik urusan Penanaman Modal maupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Perusahaan PMA/PMDN

Perusahaan-perusahaan ini merupakan target utama DPMPTSP karena mereka membutuhkan layanan perizinan usaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka. DPMPTSP membantu perusahaan PMA dan PMDN dalam proses perizinan yang efisien dan transparan, sehingga mereka dapat lebih mudah berinvestasi dan beroperasi di Kabupaten Pemalang.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha baik itu UMKM perorangan maupun UMKM badan menjadi target pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP guna membantu pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan untuk kegiatan usaha.

c. Instansi dan Lembaga Terkait

DPMPTSP juga bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk menilai perizinan yang bersifat teknis seperti perizinan bangunan gedung, izin operasinal di bidang kesehatan atau izin-izin lainnya yang memerlukan penilaian teknis.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.**

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Pemalang nomor 503/355/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, bahwa tim teknis perizinan adalah memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Perangkat Daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil

keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

Adapun mitra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menerbitkan rekemondasi teknis/kajian teknis bekerjasama dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Perumahan dan Permukiman
6. Dinas Pemuda Dan Olahraga
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Satuan Polisi Pamong Praja
13. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
14. Kantor Pertanahan

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1. Permasalahan**

Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.11.**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya peningkatan investasi dan pelayanan perijinan PTSP	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
		Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media informasi digital
	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Keterbatasan ruang dan sarpras Mal Pelayanan Publik
		Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penilaian perizinan teknis
	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kurangnya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
		Keterbatasan sarana mobilitas pengawasan dan pengendalian penanaman modal

**2.2.2. Isu Strategis**

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelayanan DPMPTSP karena dampaknya yang signifikan bagi kelompok sasaran DPMPTSP selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu :

1. Bersifat lintas sektor,
2. Bersifat lintas wilayah

3. Berupa fenomena atau persoalan nyata
4. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan
5. Berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan DPMPTSP
6. Dampaknya kumulatif dan berefek ganda
7. Dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan.

Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis. Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang dan melihat permasalahan yang ada serta dengan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal maka isu-isu strategis DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.12.**

**Isu Strategis DPMPSTSP Kabupaten Pemalang**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Mal Pelayanan Publik</li> <li>2. Tersedianya Peta Potensi Investasi</li> <li>3. Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal</li> <li>4. Adanya kebijakan kemudahan dan insentif penanaman modal</li> </ol>	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian ekonomi global</li> <li>2. Ketenagakerjaan</li> <li>3. Sumberdaya alam</li> <li>4. Kepastian hukum</li> <li>5. Kebijakan perang tarif pajak perdagangan dunia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketenagakerjaan</li> <li>2. Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri</li> <li>3. Perizinan</li> <li>4. Kebijakan fiscal dari pemerintah pusat yang menyebabkan investor lari dari Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketimpangan wilayah</li> <li>2. Promosi investasi</li> <li>3. Tingginya harga lahan dan infrastruktur yang belum optimal pada kawasan peruntukan industri</li> </ol>	Belum optimalnya peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang dan belum optimalnya pelayanan perijinan satu pintu
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman modal</li> <li>2. Perizinan dan non perizinan</li> </ol>	Belum optimalnya pelayanan perizinan	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birokrasi</li> <li>2. Transparansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi</li> <li>2. Transparansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi</li> <li>2. Transparansi</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman modal</li> <li>2. Perizinan dan non perizinan</li> </ol>	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat	1. Regulasi dan peraturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pemantauan</li> <li>2. Pelaporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pemantauan</li> <li>2. Pelaporan</li> </ol>	

## BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu : **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi sebagai berikut:

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
3. **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
6. **Misi 6 Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
8. **Misi 8 Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Berdasarkan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Pemalang periode 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Visi **"CAKAP** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional." dan mendukung Misi RPJMD yang ke 3 (Tiga) yaitu **"APIK:** Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah".

Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang yaitu **“Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pemalang”**.

Peningkatan investasi berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dengan memberikan kemudahan perijinan. Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan penanaman modal, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Investasi yang meningkat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui rantai nilai produksi. Dan selanjutnya lapangan kerja yang tercipta akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **3.2. Sasaran**

Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu menuju tercapainya tujuan DPMPTSP. Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”**.

Meningkatnya realisasi penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, iklim bisnis yang kondusif dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi seperti deregulasi dan penyederhanaan perizinan, mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang kedua adalah **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**. Meningkatnya kinerja pelayanan menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat serius dalam memajukan investasi di Kabupaten Pemalang.

**Tabel 3.1.**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya investasi di kabupaten	Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1 DIBAGI jumlah investasi tahun n-1 DIKALI 100%	%	11,67	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,00
			Nilai realisasi penanaman modal	Jumlah investasi seluruh perusahaan atau lembaga usaha yang dilaporkan di Kabupaten Pemalang	Rp	220.159.341.867	246.578.462.891	276.784.324.595	311.382.365.170	351.083.616.729	396.724.486.903	449.290.481.418	396.724.486.903
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP dan Nilai IKM	Nilai SAKIP dan Nilai IKM	Nilai	- 63,84 - 89,70	- 69,46 - 89,80	- 69,75 - 89,85	- 70 - 89,90	- 70,25 - 89,95	- 70,50 - 90	- 70,75 - 90,02	- 70,75 - 90,02

### 3.3. Strategi

Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didasarkan pada kriteria :

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

**Tabel 3.2.**  
**Analisis SWOT**

<p><b>ISU STRATEGIS</b></p>	<p><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu</li> <li>2. Kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem online dan tatap muka</li> <li>3. Ketersediaan Sumberdaya Manusia untuk mendukung operasional pelayanan DPMPPTSP</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal</li> <li>2. Belum optimalnya operasionalisasi Mal Pelayanan Publik</li> <li>3. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media informasi digital</li> <li>4. Kurangnya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal</li> </ol>
<p><b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi daerah sebagai daya tarik investasi</li> <li>2. Perkembangan teknologi digital yang mendukung promosi penanaman modal</li> <li>3. Sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penilaian perizinan teknis</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan iklim penanaman modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan</li> </ol>
<p><b>TANTANGAN (THREAT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesenjangan antara potensi dan peluang investasi yang ditawarkan dengan permintaan investasi yang diminta investor</li> <li>2. Kurangnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan promosi penanaman modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> </ol>

Dari kelima strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga merupakan evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3.**  
**Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Pengembangan iklim investasi daerah yang kondusif dan menarik bagi investor	Pengembangan Board Of Investment lintas Perangkat Daerah	Terwujudnya penguatan fondasi transformasi digitalisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Akselerasi transformasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Penjelasan penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tahap I (Tahun 2026)**

Penataan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menyusun standar pelayanan berbasis data yang valid dan up to date sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha baik PMA maupun PMDN. Penataan juga menyangkut pengaturan dan penyusunan fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

**Tahap II (Tahun 2027)**

Pengembangan iklim investasi daerah yang kondusif dan menarik bagi investor melalui perbaikan birokrasi, peningkatan infrastruktur, pemberian insentif, promosi potensi daerah, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan

### **Tahap III (Tahun 2028)**

Pengembangan Board Of Investment yang melibatkan Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk mendampingi investor melalui fasilitasi proses investasi, menawarkan insentif dan kemudahan investasi serta memberikan data dan informasi investasi, termasuk penyelesaian permasalahan investasi.

### **Tahap IV (Tahun 2029)**

Penguatan fondasi transformasi digitalisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan pengembangan digitalisasi teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan penanaman modal, pemberian informasi potensi investasi daerah hingga pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

### **Tahap V (Tahun 2030)**

Tahap V tahun 2030 merupakan awal tahun dimulainya Tahap II RPJPD tahun 2030-2034 yaitu dengan dimulainya akselerasi transformasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Akselerasi transformasi ini adalah dengan menjaga momentum peningkatan investasi guna memastikan peningkatan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **3.4. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

**Tabel 3.4.**  
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal**  
**Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	1. Perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP)	<b>Strategi :</b> Pengembangan Mal Pelayanan Publik <b>Arah Kebijakan :</b> 1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur MPP 2. Peningkatan kerjasama pengembangan jenis pelayanan MPP antar instansi vertikal maupun horisontal 3. Pembuatan papan investasi	
		1. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan	<b>Strategi :</b> Peningkatan kualitas pelayanan perizinan <b>Arah Kebijakan :</b> 1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan	
			<b>Strategi :</b> Pengembangan promosi penanaman modal <b>Arah Kebijakan :</b> 1. Peningkatan kegiatan temu bisnis untuk membuka peluang investasi skala regional dan nasional 2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah	
			<b>Strategi :</b> Pengembangan iklim penanaman modal <b>Arah Kebijakan :</b> 1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Pemutahiran data dan informasi potensi, peluang dan daya dukung investasi	
		1. Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	<b>Strategi :</b> Pengendalian pelaksanaan penanaman modal <b>Arah Kebijakan :</b> 1. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	

## **BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Sementara itu program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP tahun 2030.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang urusan penanaman modal dan bidang urusan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang..

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Arah program ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan sumber daya DPMPTSP, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah program ini mencakup pemberian insentif penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi yang menyangkut kebijakan rencana umum penanaman modal dan penyediaan datadad informasi potensi investasi.
3. Program Promosi Penanaman Modal  
Program Promosi Penanaman Modal merupakan upaya penyediaan informasi terpadu, peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta, serta promosi melalui berbagai saluran. Arah program ini adalah untuk menarik investor.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya mempermudah dan menyederhanakan perizinan melalui pemberian insentif penanaman modal, pelayanan penanaman modal berbasis elektronik. Program ini diarahkan untuk memudahkan investor dalam pelayanan perizinan dan menarik minat investasi.
5. Program Pengendalian Penanaman Modal  
Program Pengendalian Penanaman Modal merupakan upaya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, memberikan bimbingan teknis dan pengawasan penanaman modal. Program ini diarahkan untuk memastikan investasi berjalan sesuai dengan peraturan, tujuan yang ditetapkan, dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sosial.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan upaya pengumpulan, pemeliharaan, analisis, pengembangan sistem, hingga pelaporan data penanaman modal. Program ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan**  
**Renstra DPMPSTSP Kabupaten Pematang**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pematang				Persentase peningkatan investasi		
		Meningkatnya realisasi penanaman modal			Nilai realisasi penanaman modal		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai IKM dan Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		- Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Kegiatan perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				<b>Dokumen keuangan yang sesuai regulasi</b>	<b>Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				<b>Pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi</b>	<b>Prosentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian sesuai regulasi</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				<b>Fasilitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi</b>	<b>Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<b>barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				<b>Ketersediaan layanan penunjang</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				urusan pemerintahan daerah			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Persentase Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya nilai realisasi investasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan iklim penanaman Modal	
				Kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				<b>Dokumen Peta Potensi Investasi</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			<b>Kegiatan promosi penanaman modal di tingkat regional dan/atau nasional</b>		<b>Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan</b>	<b>Program Promosi penanaman Modal</b>	
				<b>Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang terlaksana</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<b>Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan</b>	<b>Program pelayanan Penanaman Modal</b>	
				<b>Perizinan yang disetujui</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha		<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	
				Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<b>Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	
			Profil investasi sektor unggulan daerah		<b>Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
 Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan**  
**Renstra DPMPTSP Kabupaten Pematang**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 63,84 - 89,70	- 69,75 - 89,85	5.246.49 3.000	- 70 - 89,90	6.015.05 3.303	- 70,25 - 89,95	6.015.053. 303	- 70,50 - 90	6.015.053. 303	- 70,75 - 90,02	6.015.05 3.303
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai regulasi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	100	100	59.690.5 00	100	55.744. 790	100	55.744. 790	100	55.744. 790	100	85.744.7 90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.193. 960	2 Dokumen	2.193. 960	2 Dokumen	2.193.960	2 Dokumen	2.193.960	2 Dokumen	32.193.9 60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.101. 060	1 Dokumen	2.101. 060	1 Dokumen	2.101.060	1 Dokumen	2.101.060	1 Dokumen	2.101.06 0

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.446.000	1 Dokumen	2.446.000	1 Dokumen	2.446.000	1 Dokumen	2.446.000	1 Dokumen	2.446.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	43.580.1 40	4 Laporan	39.634.4 30	4 Laporan	39.634.43 0	4 Laporan	39.634.43 0	4 Laporan	39.634.4 30
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	1.000.00 0	1 Berita Acara	1.000.000	1 Berita Acara	1.000.000	1 Berita Acara	1.000.00 0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai regulasi</b>	<b>Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.228.94 6.500</b>	<b>100</b>	<b>3.988.12 2.600</b>	<b>100</b>	<b>3.988.122. 600</b>	<b>100</b>	<b>3.988.122. 600</b>	<b>100</b>	<b>3.988.12 2.600</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	32 Orang	4.225.56 7.000	32 Orang	3.984.52 2.000	32 Orang	3.984.522. 000	32 Orang	3.984.522. 000	32 Orang	3.984.52 2.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.861.000	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	1.000.000	0 Laporan	1.000.000	0 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1 Dokumen	1.518.500	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi Kepegawaian sesuai regulasi</b>	<b>Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian sesuai regulasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>316.000.000</b>	<b>100</b>	<b>316.000.000</b>	<b>100</b>	<b>316.000.000</b>	<b>100</b>	<b>316.000.000</b>

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	64 Paket	16.000.000	64 Paket	16.000.000	64 Paket	16.000.000	64 Paket	16.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0	64 Orang	100.000.000	64 Orang	100.000.000	64 Orang	100.000.000	64 Orang	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>186.259.000</b>	<b>100</b>	<b>445.810.000</b>	<b>100</b>	<b>445.810.000</b>	<b>100</b>	<b>445.810.000</b>	<b>100</b>	<b>445.810.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.000.000	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	94.883.250	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.930.750	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.804.000	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.015.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	114 Laporan	25 Laporan	71.626.000	100 Laporan	270.000.000	100 Laporan	270.000.000	100 Laporan	270.000.000	100 Laporan	270.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		SKPD											
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>375.897.913</b>	<b>100</b>	<b>375.897.913</b>	<b>100</b>	<b>375.897.913</b>	<b>100</b>	<b>375.897.913</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	150.897.913	1 Unit	150.897.913	1 Unit	150.897.913	1 Unit	150.897.913
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya aktifitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggara nya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	644.872. 000	100	648.478. 000	100	648.478.0 00	100	648.478.0 00	100	648.478. 000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.000.00 0	12 Laporan	2.000.00 0	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.00 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	144.600. 000	12 Laporan	141.478. 000	12 Laporan	141.478.0 00	12 Laporan	141.478.0 00	12 Laporan	141.478. 000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 laporan	0	12 laporan	5.000.00 0	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.00 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	499.272. 000	12 Laporan	500.000. 000	12 Laporan	500.000.0 00	12 Laporan	500.000.0 00	12 Laporan	500.000. 000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>126.725. 000</b>	<b>100</b>	<b>185.000. 000</b>	<b>100</b>	<b>185.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>185.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>185.000. 000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	15.000.0 00	1 Unit	15.000.00 0	1 Unit	15.000.00 0	1 Unit	15.000.0 00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	55.000.0 00	29 Unit	60.000.0 00	29 Unit	60.000.00 0	29 Unit	60.000.00 0	29 Unit	60.000.0 00
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	10.000.0 00	10 Unit	10.000.00 0	10 Unit	10.000.00 0	10 Unit	10.000.0 00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	61.725.0 00	25 Unit	60.000.0 00	25 Unit	60.000.00 0	25 Unit	60.000.00 0	25 Unit	60.000.0 00

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000
<b>Program Pengembangan Iklim penanaman Modal</b>	<b>Meningkatnya iklim penanaman modal</b>	<b>Realisasi Total terhadap Target Investasi</b>	<b>107,37</b>	<b>100</b>	<b>11.096.600</b>	<b>100</b>	<b>65.381.710</b>	<b>100</b>	<b>65.381.710</b>	<b>100</b>	<b>65.381.710</b>	<b>100</b>	<b>65.381.710</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya aktifitas Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.548.300</b>	<b>100</b>	<b>50.381.710</b>	<b>100</b>	<b>50.381.710</b>	<b>100</b>	<b>50.381.710</b>	<b>100</b>	<b>50.381.710</b>
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	5.548.300	1 Dokumen	10.381.710	1 Dokumen	10.381.710	1 Dokumen	10.381.710	1 Dokumen	10.381.710
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		UMKM di daerah											
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya aktifitas Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi investasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.548.300</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.548.300	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	0 Daerah	0	1 Daerah	5.000.000	1 Daerah	5.000.000	1 Daerah	5.000.000	1 Daerah	5.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.00 0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.00 0
<b>Program Promosi penanaman Modal</b>	<b>Meningkatnya promosi penanaman modal</b>	<b>Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26.473.4 00</b>	<b>100</b>	<b>222.145. 547</b>	<b>100</b>	<b>222.145.5 47</b>	<b>100</b>	<b>222.145.5 47</b>	<b>100</b>	<b>222.145. 547</b>
<b>Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya aktifitas Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26.473.4 00</b>	<b>100</b>	<b>222.145. 547</b>	<b>100</b>	<b>222.145.5 47</b>	<b>100</b>	<b>222.145.5 47</b>	<b>100</b>	<b>222.145. 547</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	21.115.0 00	2 Dokumen	122.145. 547	2 Dokumen	122.145.5 47	2 Dokumen	122.145.5 47	2 Dokumen	122.145. 547
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5.358.40 0	2 Dokumen	100.000. 000	2 Dokumen	100.000.0 00	2 Dokumen	100.000.0 00	2 Dokumen	100.000. 000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	75.000.000	100	50.240.750	100	50.240.750	100	50.240.750	100	50.240.750
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya aktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	75.000.000	100	50.240.750	100	50.240.750	100	50.240.750	100	50.240.750
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.465 Pelaku Usaha	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	4.500 Pelaku Usaha	35.240.750	5.000 Pelaku Usaha	35.240.750	5.500 Pelaku Usaha	35.240.750	6.000 Pelaku Usaha	35.240.750
Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000	5 Pelaku Usaha	5.000.000	5 Pelaku Usaha	5.000.000	5 Pelaku Usaha	5.000.000	5 Pelaku Usaha	5.000.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah	72 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	15.000.000	50 Kegiatan Usaha	5.000.000	50 Kegiatan Usaha	5.000.000	50 Kegiatan Usaha	5.000.000	50 Kegiatan Usaha	5.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha											
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Meningkatnya pengendalian penanaman modal</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha</b>	<b>83,33</b>	<b>100</b>	<b>62.430.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya aktifitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>62.430.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100</b>	<b>30.690.000</b>
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	2.430.000	12 Kegiatan Usaha	10.000.000	12 Kegiatan Usaha	10.000.000	12 Kegiatan Usaha	10.000.000	12 Kegiatan Usaha	10.000.000

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Uraian/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	367 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	5.000.00 0	100 Pelaku Usaha	10.000.0 00	100 Pelaku Usaha	10.000.00 0	100 Pelaku Usaha	10.000.00 0	100 Pelaku Usaha	10.000.0 00
Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	55.000.0 00	60 Kegiatan Usaha	10.690.0 00	60 Kegiatan Usaha	10.690.00 0	60 Kegiatan Usaha	10.690.00 0	60 Kegiatan Usaha	10.690.0 00

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang  
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Profil investasi sektor unggulan daerah	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	100	100	25.000.0 00	100	24.387.2 80	100	24.387.28 0	100	24.387.28 0	100	24.387.2 80
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Terlaksananya aktifitas Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100	100	25.000.0 00	100	24.387.2 80	100	24.387.28 0	100	24.387.28 0	100	24.387.2 80
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.0 00	1 Dokumen	24.387.2 80	1 Dokumen	24.387.28 0	1 Dokumen	24.387.28 0	1 Dokumen	24.387.2 80
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>5.446.49 3.000</b>		<b>7.653.15 5.390</b>		<b>7.681.155. 390</b>		<b>7.706.155. 390</b>		<b>7.761.15 5.390</b>

#### 4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPMPSTP Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas.

**Tabel 4.3.**

#### Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Meningkatnya nilai realisasi investasi	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan promosi penanaman modal di tingkat regional dan/atau nasional	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Program pelayanan Penanaman Modal	Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			Pengawasan Penanaman Modal	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Profil investasi sektor unggulan daerah	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

#### 4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama.

**Tabel 4.4.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Pemalang**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	246.578.462.891	276.784.324.595	311.382.365.170	351.083.616.729	396.724.486.903	449.290.481.418	
3	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	89,80	89,85	89,90	89,95	90,00	90,02	
4	Nilai SAKIP	Indeks	69,46	69,75	70	70,25	70,50	70,75	

#### **4.4. INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, serta untuk mengetahui apakah tujuan pembangunan daerah telah tercapai. Dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) ini juga di dalamnya termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**Tabel 4.6.**

**Indikator Kinerja Daerah (IKD) DPMPTSP Kabupaten Pemalang**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL

Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang dengan sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal.
3. Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal.
4. Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

## **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

## **5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi**

Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Pengendalian memastikan bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai pencapaian target dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal 1 (satu) kali selama periode 5 tahun (Periode Renstra).

## **5.4. Tahun Transisi**

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang pada tahun 2030 sebagai tahun transisi dimana pada tahun tersebut belum disusunnya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034.